

ABSTRAK

Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, awalnya terletak pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan, namun didalam prakteknya kedua lembaga tersebut belum menunjukkan hasil kinerja yang efisien dan efektif dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga khusus anti korupsi ini dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kedudukan KPK didalam Sistem Peradilan Pidana masih kabur. Oleh karena itu, melalui thesis yang berjudul “ Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ” ini dibahas 2 isu hukum yaitu KPK sebagai lembaga negara dan kedudukannya di Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian direlasikan terhadap beberapa teori dan prinsip hukum untuk menjadi landasan dalam menganalisis dan menjawab 2 isu hukum dalam penelitian ini.

Kata Kunci : KPK, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

The handling of the criminal acts of corruption in Indonesia, the first based on the authority of the Indonesian National Police (POLRI) and the Attorney, but in practice both of these institutions haven't shown efficiently and effectively in handling corruption cases in Indonesia. This special anti corruption institution formed in Law No 30 of 2002 on the law corruption eradication commission. Since the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK), the KPK's position within the Criminal Justice System is still vague. Therefore, through this thesis in title " Position of the Corruption Eradication Commission in Criminal Justice System " discussed 2 legal issues are KPK as state institution and its position in criminal justice system. Method of approach used statute approach and conceptual approach in which related to some theories and principles of law to come a based in analysis and answered 2 legal issues in this research.

Keywords : KPK, Criminal Justice System.